

ABSTRAK

Zidan Al Fadlil Sukatma Putra (2025): Implementasi Asas Tanggung Jawab Negara Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Latar Belakang Penelitian ini yaitu banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni faktor cemburunya salah satu pasangan juga faktor ekonomi yang sedang lemah. Perlindungan, menjadi salah satu upaya bagi pemenuhan dan pemberian bantuan kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan Undang-Undang. Saksi dan korban mempunyai peranan yang sangat strategis yang menjadikan peran saksi dan korban sangat dibutuhkan. Permasalahan yang seringkali dihadapi adalah banyaknya saksi dan korban yang tidak bersedia karena kurangnya jaminan perlindungan saksi dan korban serta saksi dan korban seringkali mengalami intimidasi dan tuntutan hukum dari kesaksian yang diberikannya.

Tujuan Penelitian ini, 1) Untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 2) Untuk menganalisis faktor penghambat dan penunjang pelaksanaan kewenangan LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 3) Untuk menganalisis upaya LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagai bentuk perlindungan negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan melihat bagaimana implementasi hukum normatif dimasyarakat.

Kerangka teori yang diambil adalah teori Tanggung Jawab Negara (Grand Theory), Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia (Middle Theory), Teori Pengakuan Hukum (Applied Theory).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dalam pasal 12 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kendala yang dihadapi secara keseluruhan dalam melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban oleh LPSK yaitu Sumber daya manusia yang masih terbatas, menyebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pegawai yang ada dengan beban kerja yang semakin bertambah, Keterbatasan akses masyarakat dalam mendapatkan layanan LPSK karena kantor perwakilan LPSK yang masih terbatas, sehingga masih ada kendala dalam memberikan layanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Sementara kendala yang dihadapi LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu, korban tiba – tiba mencabut permohonan perlindungan. Upaya LPSK dalam melakukan perlindungan terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu, dengan mengajukan permohonan pembangunan kantor perwakilan di daerah juga upaya pengoptimalan dari sahabat saksi korban yang saat ini menjadi relawan bagi LPSK dalam memberikan bantuan perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. **Kata Kunci: Kekerasan rumah tangga, Perlindungan Korban, LPSK**

ABSTRACT

Zidan Al Fadlil Sukatma Putra (2025): Implementation of the Principle of State Responsibility for Domestic Violence by the Witness and Victim Protection Agency

Background of this research is that there are many factors that cause domestic violence, namely jealousy of one of the partners and weak economic factors. Protection is one of the efforts to fulfill and provide assistance to witnesses and/or victims that must be carried out by institutions in accordance with the Law. Witnesses and victims have a very strategic role that makes the role of witnesses and victims very much needed. The problem that is often faced is the large number of witnesses and victims who are unwilling due to the lack of guarantees of protection for witnesses and victims and witnesses and victims often experience intimidation and lawsuits from the testimony they give.

The purpose of this study, 1) To analyze the implementation of LPSK's authority in protecting victims of domestic violence. 2) To analyze the inhibiting and supporting factors in the implementation of LPSK's authority in protecting victims of domestic violence. 3) To analyze LPSK's efforts in protecting victims of domestic violence as a form of state protection.

The method used in this study is descriptive analysis with a qualitative research type. The approach used is an empirical juridical approach, by looking at how normative law is implemented in society.

The theoretical framework used is the theory of State Responsibility (Grand Theory), Theory of Human Rights Protection (Middle Theory), Theory of Legal Enforcement (Applied Theory). The results of this study indicate that LPSK is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims based on the duties and authorities stipulated in the Law. In carrying out its duties, it is regulated in Article 12 of Law No. 31 of 2014 concerning Amendments to Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. The obstacles faced overall in providing protection for witnesses and victims by LPSK are limited human resources, causing an imbalance between the number of existing employees and the increasing workload, limited public access to LPSK services because LPSK representative offices are still limited, so there are still obstacles in providing services to the community throughout Indonesia. Meanwhile, the obstacles faced by LPSK in providing protection for victims of domestic violence are that the victim suddenly withdraws the application for protection. LPSK's efforts in providing protection for Domestic Violence Victims are by submitting a request for the establishment of a representative office in the region as well as optimizing efforts from friends of victim witnesses who are currently volunteers for LPSK in providing protection assistance for victims of Domestic Violence.

Keywords: Domestic violence, Victim Protection, LPSK